

**PERAN *GREEN GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMODERASI
FINANCIAL PERFORMANCE, OWNERSHIP STRUCTURE, DAN CREDIT RISK
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN**

(Study Empiris Pada Perusahaan Bank BUMN Indonesia Periode 2014-2023)

Muhammad Irji Fachriji¹, Sugiyanto², Nani Rusnaeni³

Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana
Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Published 20 Maret 2025	Published 23 Maret 2025	Published 24 Maret 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peran *green good corporate governance* dalam memoderasi *financial performance, ownership structure, dan credit risk* terhadap kebijakan dividen (Study Empiris Pada Perusahaan Bank BUMN Indonesia Periode 2014-2023). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapun teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh 7 perusahaan Bank BUMN Indonesia Periode 2014-2023, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, uji hipotesis, dan uji *moderating regression analysis* (MRA) dengan menggunakan Eviews Versi 12. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, 1. *Financial performance* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 2. *Ownership structure* berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 3. *Credit risk* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 4. *Financial performance, ownership structure, dan credit risk* secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 5. *Green good corporate governance* tidak mampu memoderasi *financial performance* terhadap kebijakan dividen, 6. *Green good corporate governance* mampu memoderasi *ownership structure* terhadap kebijakan dividen, 7. *Green good corporate governance* tidak mampu memoderasi *credit risk* terhadap kebijakan dividen. Dan koefisien determinasi pada nilai *adjusted R square* sebesar 30,71% dan sisanya 69,29% yang artinya *financial performance, ownership structure, dan credit risk* memiliki kontribusi sebesar 30,71% dalam penelitian ini.

Kata kunci: *green good corporate governance, financial performance, ownership structure, credit risk dan kebijakan dividen*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of the role of green good corporate governance in moderating financial performance, ownership structure and credit risk on dividend policy (Empirical Study on Indonesian State-Owned Bank Companies for the 2014-2023 Period). The research was conducted using quantitative descriptive methods. The sample selection technique used was purposive sampling and 7 Indonesian BUMN Bank companies were obtained for the 2014-2023 period, so the total sample used in this research was 70 samples. The data analysis method used is panel data regression analysis, hypothesis testing, and moderating regression analysis (MRA) test using Eviews Version 12. The research results can be concluded as follows, 1. financial performance has no effect on dividend policy, 2. ownership structure has an effect on dividend policy, 3. credit risk has no influence on dividend policy, 4. financial performance, ownership structure and credit risk simultaneously influence dividend policy, 5. Green good corporate governance is unable to moderate financial performance on dividend policy, 6. Green good corporate governance is capable moderating ownership structure on dividend policy, 7. Green good corporate governance is unable to moderate credit risk on dividend policy. And the coefficient of determination on the adjusted R square value is 30.71% and the remaining 69.29%, which means that financial performance, ownership structure and credit risk have a contribution of 30.71% in this research.

Keywords: *green good corporate governance, financial performance, ownership structure, credit risk and dividend policy.*

PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sebagai lembaga yang menggerakkan arus uang, mendukung kegiatan investasi, dan memfasilitasi pembiayaan bagi berbagai sektor. Salah satu sektor yang memiliki

pengaruh besar di industri perbankan Indonesia adalah perbankan milik negara, atau yang lebih dikenal dengan perbankan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bank-bank BUMN di Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar ekonomi yang mendukung pembangunan nasional, baik dalam sektor infrastruktur, UMKM, maupun sektor-sektor vital lainnya. Beberapa bank BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang semakin meningkatkan peran dan transparansi mereka dalam pasar modal. Bank-bank ini tidak hanya beroperasi sebagai lembaga finansial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi negara.

Meskipun perbankan BUMN di Indonesia telah menunjukkan kinerja yang cukup stabil, mereka tetap menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi kebijakan operasional dan pertumbuhan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi dengan bank swasta yang semakin ketat, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pembiayaan konsumsi dan kredit korporasi. Bank-bank swasta, terutama yang berorientasi pada layanan digital, semakin populer di kalangan konsumen muda yang lebih memilih layanan perbankan yang cepat dan mudah diakses melalui aplikasi mobile. Hal ini mendorong bank BUMN untuk meningkatkan inovasi dan digitalisasi layanan agar tetap kompetitif. Selain itu, tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, dan risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi juga dapat mempengaruhi kinerja perbankan BUMN.

Namun, meskipun menghadapi tantangan, perbankan BUMN juga memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu peluang terbesar terletak pada pembangunan infrastruktur dan sektor UMKM, yang menjadi fokus utama bagi banyak bank BUMN. Pemerintah Indonesia melalui program Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berbagai kebijakan stimulus lainnya memberikan ruang bagi bank-bank BUMN untuk terlibat lebih aktif dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya inklusi keuangan, bank BUMN juga memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan mereka kepada segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani, terutama di daerah-daerah terpencil. Peningkatan digitalisasi dalam perbankan juga membuka peluang bagi bank BUMN untuk menjangkau nasabah yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip *Good Corporate Governance* semakin menjadi sorotan dalam dunia bisnis, terutama bagi perusahaan besar yang beroperasi di pasar publik. *Good Corporate Governance* dianggap sebagai fondasi yang penting dalam mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, muncul konsep yang lebih spesifik yang disebut dengan *Green Good Corporate Governance*, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks perbankan, terutama bank-bank milik negara atau Bank BUMN Indonesia, penerapan *Green Good Corporate Governance* diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola perusahaan, tetapi juga memengaruhi keputusan-keputusan strategis lainnya, termasuk kebijakan dividen.

Dalam prakteknya, *Green Good Corporate Governance* memberikan panduan bagi perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan transparan, sekaligus memastikan bahwa operasionalnya tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penerapan *Green Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara manajemen dan pemegang saham, serta memperbaiki citra perusahaan di mata publik, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, perusahaan yang mengadopsi prinsip *Green Good Corporate Governance* memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan operasional jangka panjang mereka, serta mengurangi potensi risiko sosial dan lingkungan.

Menurut Sutrisno & Hasan (2018), *Green Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang tidak hanya fokus pada profitabilitas dan kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam operasionalnya. Oleh karena itu dalam dunia perbankan, *Green Good Corporate Governance* memainkan peran penting dalam menciptakan integritas dan kepercayaan di mata masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bank yang menerapkan *Green Good Corporate Governance* harus memasukkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kebijakan mereka. Ini mencakup mendukung proyek-proyek hijau, seperti pembiayaan energi terbarukan, serta menghindari pendanaan untuk proyek yang merusak lingkungan. Misalnya, bank dapat menilai dampak lingkungan suatu proyek sebelum memberikan kredit atau investasi dengan memilih untuk tidak memberikan pembiayaan untuk proyek yang berpotensi merusak lingkungan dan lebih memilih proyek yang mendukung keberlanjutan seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, atau pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Selain itu bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan aspek sosial dan lingkungan, seperti dampak perubahan iklim terhadap portofolio kredit mereka, atau risiko reputasi jika bank terlibat dalam pembiayaan proyek yang merusak lingkungan atau tidak mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Dimana prinsip transparansi dalam *Green Good Corporate Governance* mengharuskan bank untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dengan jelas dan terbuka, baik dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka.

Dalam praktiknya komisaris independen berperan sangat penting dalam memastikan penerapan *Green Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, karena mereka berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan praktik perusahaan agar tetap berfokus pada kepentingan jangka panjang, yang mencakup keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Komisaris independen memiliki tugas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan dan strategi perusahaan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris sangat penting dalam mendukung penerapan *Green Good Corporate Governance*, karena mereka dapat memberikan perspektif yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan internal yang bersifat jangka pendek (Trisnawati, 2022).

Acuan hukum komisaris independen adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya. Dimana dalam perusahaan efek, persentase jumlah komisaris independen yang wajib ada dalam Dewan Komisaris adalah minimal 30%.

**Gambar 1.1.****Perkembangan Rasio Proporsi Komisaris Independen Tahun 2014-2023**

Komisaris independen memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa bank mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan proporsi yang cukup besar, komisaris independen bisa lebih efektif dalam mempengaruhi keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti pembiayaan proyek-proyek hijau atau pengelolaan risiko terkait lingkungan (Indriantoro & Supomo, 2019).

Kebijakan dividen pada bank memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan di sektor lain, mengingat bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan tunduk pada regulasi ketat dari otoritas moneter, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen bank adalah persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh regulator, seperti rasio kecukupan modal (CAR), yang harus dipertahankan agar bank tetap stabil secara finansial. Bank perlu memastikan bahwa pembagian dividen tidak mengganggu likuiditas dan solvabilitasnya, serta dapat mempertahankan cadangan modal yang cukup untuk mendukung operasi dan ekspansi di masa depan. Oleh karena itu, bank cenderung berhati-hati dalam menentukan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Selain faktor regulasi, kinerja keuangan bank juga mempengaruhi keputusan terkait kebijakan dividen. Jika bank mengalami keuntungan yang stabil dan memiliki cadangan yang cukup, mereka mungkin akan membagikan dividen dengan rasio yang lebih tinggi, terutama jika laba tahunannya signifikan. Namun, pada saat kondisi ekonomi atau pasar sedang tidak menentu, seperti dalam situasi resesi atau ketidakpastian ekonomi, bank biasanya lebih konservatif dalam membagikan dividen dan memilih untuk menahan sebagian besar laba untuk memperkuat modal dan menjaga daya tahan operasionalnya. Hal ini sering dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian atau kebutuhan dana yang mendesak di masa depan.

Selain itu, kebijakan dividen pada bank juga dipengaruhi oleh ekspektasi pemegang saham. Pemegang saham bank, terutama yang berasal dari institusi besar atau pemerintah, cenderung mengharapkan dividen yang stabil atau meningkat setiap tahunnya sebagai indikasi kinerja yang baik dan stabilitas perusahaan. Namun, untuk bank yang sedang dalam tahap ekspansi atau berusaha meningkatkan kinerja operasionalnya, pembagian dividen mungkin akan lebih rendah, dengan tujuan menahan lebih banyak laba untuk investasi dan pengembangan bisnis. Pada akhirnya, kebijakan dividen bank harus mencerminkan keseimbangan antara memenuhi harapan pemegang saham, mematuhi regulasi yang ada, serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bank dalam jangka panjang.

**Gambar 1.2.****Perkembangan Kebijakan Dividen Tahun 2014-2023**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur kewajiban bank untuk memiliki kebijakan pembayaran dividen. Ini lantaran OJK menilai rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*/DPR) yang diberikan oleh emiten perbankan terlalu besar. Secara umum, rasio antara 30% dan 40% dianggap optimal. Jika *dividend payout ratio* perusahaan melebihi 100%, berarti perusahaan membayar lebih banyak dividen kepada pemegang saham daripada laba bersih yang mereka peroleh.

Menurut Husnan (2021), kebijakan dividen yang baik adalah kebijakan yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kebijakan dividen yang optimal adalah yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan jangka panjang, namun juga tetap memberikan keuntungan kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen mengacu pada keputusan perusahaan untuk mendistribusikan sebagian dari laba yang diperoleh kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen yang baik adalah salah satu tanda perusahaan yang memiliki tata kelola yang sehat, karena keputusan tersebut mencerminkan pertimbangan manajer terhadap keseimbangan antara kebutuhan untuk melakukan investasi ulang dan kepuasan pemegang saham. Namun, kebijakan dividen tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor internal perusahaan, seperti kinerja keuangan (*financial performance*), struktur kepemilikan (*ownership structure*), dan risiko kredit (*credit risk*) yang dapat memengaruhi keputusan manajerial terkait dengan pembagian laba (Husin & Sri, 2023).

Kinerja keuangan perbankan merupakan cerminan dari seberapa efektif sebuah bank dalam mengelola aset, liabilitas, serta sumber daya keuangannya untuk menghasilkan keuntungan, memelihara likuiditas, dan menjaga solvabilitas. Dalam industri perbankan, kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh rasio-rasio utama yang dapat menggambarkan kesehatan finansial bank, seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio *non-performing loan* (NPL), rasio *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE). Rasio-rasio ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba, tetapi juga seberapa efektif bank mengelola risiko kredit, likuiditas, dan stabilitas modalnya. Kinerja keuangan bank yang baik umumnya tercermin dari kemampuan bank untuk tetap profitable meskipun dalam kondisi pasar yang sulit, serta memiliki cadangan yang cukup untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi.

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank adalah rasio kecukupan modal (CAR), yang mengukur seberapa besar modal yang dimiliki bank untuk menutupi risiko yang timbul dari aktivitas operasionalnya, terutama yang terkait dengan kredit

dan investasi. Rasio kecukupan modal yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk bertahan dalam situasi keuangan yang buruk. Rasio ini sangat penting, karena bank yang memiliki modal yang cukup dapat bertahan dalam periode krisis dan menghindari potensi kebangkrutan akibat penurunan kualitas aset. Sebagai tambahan, rasio *non-performing loan* (NPL) juga menjadi indikator penting untuk menilai kualitas kredit bank, di mana semakin rendah NPL, semakin baik kualitas kredit yang dimiliki bank.

Selain itu, profitabilitas adalah aspek lain yang penting dalam menilai kinerja keuangan bank. Rasio-rasio seperti *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) memberikan gambaran tentang efisiensi bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimilikinya. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba yang signifikan dari total aset yang dimiliki, sementara ROE yang tinggi menunjukkan bahwa bank dapat menghasilkan keuntungan yang baik bagi pemegang saham dengan menggunakan modal yang ada. Dalam sektor perbankan, profitabilitas yang sehat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, memperkuat daya saing bank, dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

Menurut Kasmir (2018:201) "*Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan serta merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya".



Gambar 1.3.

Perkembangan Return On Asset Tahun 2014-2023

Namun, kinerja keuangan bank juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, serta regulasi yang diterapkan oleh otoritas pengawas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral dapat memengaruhi margin bunga bersih bank, sementara regulasi terkait cadangan wajib atau rasio kecukupan modal juga dapat membatasi kebebasan bank dalam mengalokasikan dana. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, seperti resesi atau krisis finansial global, kinerja keuangan bank dapat tertekan, dan hal ini bisa tercermin dalam penurunan laba atau kenaikan NPL. Oleh karena itu, selain mengelola aspek internal, bank juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi yang ada agar dapat mempertahankan kinerja keuangan yang optimal.

Selain itu, *ownership structure* (struktur kepemilikan) perusahaan juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan dividen. Struktur kepemilikan perbankan merujuk pada cara di mana saham-saham bank dimiliki oleh berbagai pihak, termasuk individu,

perusahaan, institusi, serta pemerintah. Struktur kepemilikan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan bank, keputusan strategis, serta tingkat pengawasan yang diterapkan dalam operasional bank. Di Indonesia, bank-bank dapat memiliki berbagai macam pemilik, mulai dari pemegang saham mayoritas yang mungkin berasal dari lembaga keuangan besar atau perusahaan konglomerasi, hingga pemegang saham minoritas yang lebih beragam, termasuk investor ritel. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di mana pemerintah menjadi pemegang saham utama, yang memberikan pengaruh langsung terhadap kebijakan dan operasional bank tersebut.

Di sisi lain, bank swasta nasional atau bank asing yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang berbeda. Bank swasta nasional sering kali memiliki pemegang saham mayoritas yang berasal dari kelompok bisnis besar atau keluarga, yang kemudian mengendalikan arah kebijakan dan strategi bank. Sedangkan untuk bank asing, kepemilikan saham bisa lebih terbuka dengan investor luar negeri yang memiliki kontrol signifikan atas bank tersebut. Kepemilikan asing di sektor perbankan Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan batasan tertentu, misalnya, kepemilikan asing maksimal 40% pada bank umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank tetap memiliki kontrol domestik yang cukup meskipun terdapat investor asing.

Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan perbankan cukup besar. Pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan strategis, seperti keputusan dalam pemberian kredit, pengelolaan risiko, dan kebijakan dividen. Selain itu, struktur kepemilikan juga memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank. Misalnya, bank yang dimiliki oleh pemerintah cenderung memiliki kepentingan untuk mendukung kebijakan ekonomi negara, seperti penyaluran kredit ke sektor-sektor tertentu, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, bank yang dimiliki oleh kelompok bisnis swasta lebih fokus pada aspek profitabilitas dan efisiensi operasional.



Gambar 1.4.

**Perkembangan Saham Milik Negara
pada Bank BUMN/BUMD Tahun 2014-2023**

Struktur kepemilikan juga berperan penting dalam hal pengawasan dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, bank yang dimiliki oleh publik atau memiliki banyak pemegang saham minoritas cenderung memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan atau keberatan terkait kebijakan yang diambil oleh manajemen bank. Sebaliknya, pada bank yang dimiliki

oleh satu kelompok atau keluarga besar, pengawasan bisa lebih terpusat, yang berpotensi menciptakan tantangan dalam hal keberagaman perspektif dan pengelolaan konflik kepentingan. Oleh karena itu, struktur kepemilikan yang sehat harus memastikan keseimbangan antara kontrol manajemen yang efisien dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Risiko kredit juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Risiko kredit (*credit risk*) dalam perbankan adalah risiko yang timbul akibat kemungkinan peminjam atau debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Sebagai salah satu jenis risiko utama dalam industri perbankan, risiko kredit dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan bank, karena ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjaman dapat menyebabkan kerugian langsung, baik dalam bentuk kerugian kredit maupun penurunan nilai aset bank. Risiko ini bisa muncul dari berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, seperti kredit konsumsi, kredit komersial, kredit investasi, atau pembiayaan lainnya, baik kepada individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan operasional bank.

Pengelolaan risiko kredit di bank dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang mencakup penilaian kelayakan kredit, pemantauan portofolio kredit, dan penggunaan jaminan atau agunan. Salah satu langkah pertama dalam mengelola risiko kredit adalah melakukan analisis kredit yang cermat, yaitu penilaian terhadap kemampuan pembayaran debitur, baik dari segi kapasitas finansial, sejarah kredit, serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur, seperti kondisi ekonomi dan industri. Bank juga menerapkan prosedur standar untuk mengevaluasi risiko kredit, termasuk penggunaan sistem rating atau skor kredit yang mengklasifikasikan peminjam berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Selain itu, bank sering kali menggunakan jaminan atau agunan sebagai bentuk perlindungan tambahan untuk mengurangi risiko kredit. Agunan tersebut dapat berupa aset fisik, seperti properti atau kendaraan, yang dapat dilelang jika debitur gagal membayar pinjaman. Meskipun demikian, penggunaan agunan tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kredit, karena nilai agunan bisa turun seiring waktu atau terjadi kesulitan dalam proses likuidasi. Oleh karena itu, bank perlu menjaga proporsi kredit yang diberikan dengan jaminan yang cukup, serta melakukan evaluasi berkala terhadap nilai agunan untuk memastikan perlindungan yang optimal. Selain itu, diversifikasi portofolio kredit juga menjadi strategi penting dalam mengelola risiko kredit, dengan cara membagikan kredit kepada berbagai sektor atau jenis usaha yang berbeda, sehingga risiko kerugian dapat tersebar.

Risiko kredit juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang buruk, penurunan daya beli masyarakat, atau resesi yang dapat meningkatkan tingkat gagal bayar. Pada saat perekonomian melambat, perusahaan dan individu cenderung kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka, yang meningkatkan potensi kredit macet. Oleh karena itu, bank perlu memantau secara terus-menerus perkembangan ekonomi makro dan indikator-indikator pasar untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit. Selain itu, bank juga harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pencadangan kerugian atas pinjaman bermasalah, seperti melalui pembentukan cadangan kerugian pinjaman (*loan loss provisions*) untuk menanggulangi potensi kerugian akibat kredit macet. Pengelolaan risiko kredit yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial bank dan menghindari kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya.

**Gambar 1.5.****Perkembangan Tingkat Risiko Kredit Perbankan Tahun 2014-2023**

Secara umum, rasio NPL yang dianggap wajar bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan karakteristik industri, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Menurut OJK, rasio NPL bruto yang wajar untuk bank-bank umum adalah di bawah 5%. Jika rasio NPL melebihi angka tersebut, bank dianggap menghadapi potensi risiko kredit yang cukup tinggi, dan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit serta memperketat prosedur kredit. Rasio NPL yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank telah memberikan pinjaman kepada debitur dengan kualitas yang rendah, atau ada masalah ekonomi makro yang menyebabkan peningkatan tingkat gagal bayar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu dari penelitian Cahyadi et. al. (2018) dan penelitian Lajar & Marsudi (2021) serta penelitian Natsir et. al. (2023) menunjukkan hasil bahwa *return on asset*, kepemilikan institusional dan *non performing loan* memiliki pengaruh terhadap *dividen payout ratio*.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Afriani (2024) dan penelitian Husin & Sri (2023) serta penelitian Meirawati (2024) menunjukkan hasil bahwa *return on asset*, kepemilikan institusional dan *non performing loan* tidak memiliki pengaruh terhadap *dividen payout ratio*.

Penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi dan sampel yang berbeda, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada data penelitian yang sama-sama berasal dari Bursa Efek Indonesia dan ada variabel yang telah diteliti kembali. Kemudian perbedaannya pada jumlah sampel, periode pengamatan, variabel independen yang menggabungkan variabel yang pernah diteliti dari beberapa penelitian sebelumnya.

Periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini pada tahun 2014-2023 secara berturut. Dalam penelitian, peneliti menggunakan 5 (lima) variabel yaitu variabel independen adalah *financial performance*, *ownership structure*, *credit risk* dan variabel dependennya adalah kebijakan dividen, sedangkan variabel moderatornya adalah *green good corporate governance*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang mempengaruhi harga saham khususnya pada sektor perbankan. Karena adanya gap antara teori dan keadaan riil yang ada mengenai nilai perusahaan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "**Peran Green**

Good Corporate Governance dalam Memoderasi Financial Performance, Ownership Structure, dan Credit Risk Terhadap Kebijakan Dividen (Study Empiris Pada Perusahaan Bank BUMN Indonesia Periode 2014-2023)”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik masalah, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Hasmanto et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang peran *green good corporate governance* dalam memoderasi *financial performance, ownership structure, dan credit risk* terhadap kebijakan dividen dimana data-data tersebut bersumber dari *annual report* (laporan keuangan) perusahaan perbankan BUMN Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Singkat

Deskripsi objek yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan dan laporan tahunan ini diperoleh melalui <http://www.idx.co.id/>. Bursa Efek Indonesia menjadi suatu lembaga yang mendukung terselenggaranya perdagangan saham yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dengan membagi kelompok industri perusahaan yang didasarkan pada sektor yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, industri dasar kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan infrastruktur, keuangan dan perdagangan investasi.

Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan mematuhi peraturan sebagai perusahaan *go public*, seperti peraturan mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan serta melaporkan informasi mengenai kondisi perusahaan. Masing-masing perusahaan wajib memberikan data mengenai hasil kinerja agar informasi tersebut dapat diketahui oleh para investor dan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif berikut akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Hasil Statistik Deskriptif

Date: 11/16/24 Time: 00:00
Sample: 2014 2023

	X1_ROA	X2_KI	X3_NPL	Y_DPR	Z_GGCG
Mean	0.024851	0.671840	0.028341	0.471410	0.429759
Median	0.023850	0.600000	0.028850	0.466050	0.428571
Maximum	0.093000	0.990000	0.050800	0.786300	0.800000
Minimum	0.010700	0.520000	0.011600	0.000000	0.285714
Std. Dev.	0.011597	0.142984	0.008306	0.119483	0.115631
Skewness	3.443809	0.968133	0.355777	-0.558739	0.452113
Kurtosis	20.09223	2.888050	3.399639	5.580898	3.072701
Jarque-Bera	990.4520	10.97151	1.942563	23.07022	2.400154
Probability	0.000000	0.004145	0.378597	0.000010	0.301171
Sum	1.739600	47.02880	1.983900	32.99870	30.08312
Sum Sq. Dev.	0.009280	1.410658	0.004761	0.985050	0.922562
Observations	70	70	70	70	70

Sumber: Hasil Pengolahan data dari *software* E-VIEWS Versi 12, data diolah sendiri

Tabel diatas menggambarkan statistik deskriptif data masing-masing variabel pada perusahaan Bank BUMN Indonesia periode 2014-2023 setelah diolah, yang diperoleh dari 70 data observasi lengkap untuk kepentingan penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan. Nilai maximum menggambarkan nilai terbesar. Nilai mean menunjukkan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bagaimana sebaran data dalam sampel penelitian. Tujuan dari hasil uji statistik deskriptif adalah untuk melihat kualitas data yang di tunjukkan dengan angka atau nilai yang terdapat pada mean dan standar deviasi. Apabila nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi maka kualitas data adalah baik.

- Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.1 diatas pada variabel X₁ atau *financial performance* diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,011597 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,093000, berarti bahwa rata-rata *financial performance* pada perusahaan perusahaan Bank BUMN Indonesia adalah sebesar 0,093000 dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *financial performance* yang terendah yaitu sebesar 0,010700 masing-masing terjadi pada tahun 2012 dan 2023. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *financial performance* yang tertinggi yaitu sebesar 0,093000 pada tahun 2021. Standar deviasi sebesar $0,091002 < 0,778756$ artinya lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data variabel *financial performance* cenderung baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran dari variabel data yang

- kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai rasio *financial performance* antara nilai terendah dan tertinggi.
- b. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.1 diatas pada variabel X_2 atau *ownership structure* diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,142984 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,671840, berarti bahwa rata-rata *ownership structure* pada perusahaan perusahaan Bank BUMN Indonesia adalah sebesar 0,671840 dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *ownership structure* yang terendah yaitu sebesar 0,520000 yang terjadi pada tahun 2014-2023. Sedangkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *ownership structure* yang tertinggi yaitu sebesar 0,990000 pada tahun 2014-2020. Standar deviasi sebesar $0,142984 < 0,671840$ artinya lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data variabel *ownership structure* cenderung baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai rasio *ownership structure* antara nilai terendah dan tertinggi.
 - c. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.1 diatas pada variabel X_3 atau *credit risk* diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,008306 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,028341, berarti bahwa rata-rata *credit risk* pada perusahaan perusahaan Bank BUMN Indonesia adalah sebesar 0,028341 dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *credit risk* yang terendah yaitu sebesar 0,011600 yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *credit risk* yang tertinggi yaitu sebesar 0,050800 pada tahun 2020. Standar deviasi sebesar $0,008306 < 0,028341$ artinya lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data variabel *credit risk* cenderung baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai rasio *credit risk* antara nilai terendah dan tertinggi.
 - d. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.1 diatas pada variabel Y atau kebijakan dividen diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,119483 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,471410, berarti bahwa rata-rata kebijakan dividen pada perusahaan perusahaan Bank BUMN Indonesia adalah sebesar 0,028341 dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai kebijakan dividen yang terendah yaitu sebesar 0,000000 yang terjadi pada tahun 2020. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai kebijakan dividen yang tertinggi yaitu sebesar 0,7863 pada tahun 2023. Standar deviasi sebesar $0,119483 < 0,471410$ artinya lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data variabel kebijakan dividen cenderung baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai rasio kebijakan dividen antara nilai terendah dan tertinggi.
 - e. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.1 diatas pada variabel Z atau *green good corporate governance* diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,115631 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,429759, berarti bahwa rata-rata *green good corporate governance* pada perusahaan perusahaan Bank BUMN Indonesia adalah sebesar 0,429759 dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *green good corporate governance* yang terendah yaitu sebesar 0,285714 yang terjadi pada tahun 2014-2023. Sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk menjadi perusahaan yang memiliki nilai *green good corporate governance* yang tertinggi yaitu sebesar 0,800000 pada tahun 2018. Standar deviasi sebesar $0,115631 < 0,429759$ artinya lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data variabel *green good corporate governance* cenderung baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai rasio *green good corporate governance* antara nilai terendah dan tertinggi.

2. Hasil Uji Model Regresi Data Panel

Metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, diantaranya: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (FEM).

a. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model sebagai pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada *Common Effect Model* tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Berikut adalah hasil regresi menggunakan *Common Effect Model*:

Tabel 4.2.

Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y_DPR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/15/24 Time: 23:59
Sample: 2014 2023
Periods included: 10
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.383383	0.082155	4.666603	0.0000
Z_GGCG	0.578458	0.128257	4.510163	0.0000
X1_ROA	0.605042	1.128098	0.536338	0.5936
X2_KI	-0.227158	0.108665	-2.090451	0.0405
X3_NPL	-0.811253	1.868942	-0.434071	0.6657
Root MSE	0.098743	R-squared	0.307122	
Mean dependent var	0.471410	Adjusted R-squared	0.264484	
S.D. dependent var	0.119483	S.E. of regression	0.102471	
Akaike info criterion	-1.649726	Sum squared resid	0.682519	
Schwarz criterion	-1.489119	Log likelihood	62.74040	
Hannan-Quinn criter.	-1.585931	F-statistic	7.202911	
Durbin-Watson stat	0.840020	Prob(F-statistic)	0.000073	

Sumber: Hasil Pengolahan data dari *software* E-VIEWS Versi 12, data diolah sendiri

Berdasarkan hasil regresi dengan *Common Effect Model* (CEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai koefisien konstanta sebesar 0,383383 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Persamaan regresi pada *R-squared* sebesar 0,307122 menjelaskan bahwa varian *financial performance*, *ownership structure*, *credit risk*, kebijakan dividen, dan *green good corporate governance* adalah sebesar 30,71% dan sisanya sebesar 69,29% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model mengasumsikan adanya perbedaan intercept antar perusahaan. Walaupun *intercept* pada masing-masing perusahaan berbeda, setiap *intercept* tidak berubah seiring berjalannya waktu (*time series*), namun koefisien (*slope*) pada masing-masing variabel independen sama untuk setiap perusahaan maupun antar waktu. Berikut adalah hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.3.

Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y_DPR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/16/24 Time: 00:34
Sample: 2014 2023
Periods included: 10
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.679494	0.155700	4.364133	0.0001
Z_GGCG	-0.196358	0.245211	-0.800770	0.4265
X1_ROA	0.482689	0.909524	0.530706	0.5976
X2_KI	-0.192855	0.139292	-1.384539	0.1714
X3_NPL	-0.216118	1.905576	-0.113414	0.9101

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.074511	R-squared	0.605474
Mean dependent var	0.471410	Adjusted R-squared	0.538605
S.D. dependent var	0.119483	S.E. of regression	0.081160
Akaike info criterion	-2.041466	Sum squared resid	0.388628
Schwarz criterion	-1.688131	Log likelihood	82.45133
Hannan-Quinn criter.	-1.901117	F-statistic	9.054664
Durbin-Watson stat	1.263094	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan data dari *software* E-VIEWS Versi 12, data diolah sendiri

Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai koefisien konstanta sebesar 0,679494 dengan probabilitas sebesar 0,0001. Persamaan regresi pada *R-squared* sebesar 0,605474 menjelaskan bahwa varian *financial performance, ownership structure, credit risk, kebijakan dividen, dan green good corporate governance* adalah sebesar 60,54% dan sisanya sebesar 39,46% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) sebagai model estimasi regresi dengan asumsi koefisien slope konstan dan intercept berbeda antar individu dan antar waktu. Berikut adalah hasil regresi menggunakan *Random Effect Model*:

Tabel 4.4.

Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model

Dependent Variable: Y_DPR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/16/24 Time: 00:39
 Sample: 2014 2023
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 70
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.527179	0.130893	4.027560	0.0001
Z_GCG	0.106325	0.199895	0.531902	0.5966
X1_ROA	0.471814	0.907820	0.519722	0.6050
X2_KI	-0.165760	0.128441	-1.290557	0.2014
X3_NPL	-0.064344	1.849011	-0.034799	0.9723
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.087766	0.5391
Idiosyncratic random			0.081160	0.4609
Weighted Statistics				
Root MSE	0.079099	R-squared		0.037304
Mean dependent var	0.132310	Adjusted R-squared		-0.021939
S.D. dependent var	0.081199	S.E. of regression		0.082085
Sum squared resid	0.437966	F-statistic		0.629678
Durbin-Watson stat	1.156742	Prob(F-statistic)		0.643070
Unweighted Statistics				
R-squared	0.099503	Mean dependent var		0.471410
Sum squared resid	0.887035	Durbin-Watson stat		0.571131

Sumber: Hasil Pengolahan data dari *software* E-VIEWS Versi 12, data diolah sendiri

Berdasarkan hasil regresi dengan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa terdapat nilai koefisien konstanta 0,527179 dengan probabilitas sebesar 0,0001. Persamaan regresi pada *R-squared* sebesar 0,037304 menjelaskan bahwa varian *financial performance*, *ownership structure*, *credit risk*, kebijakan dividen, dan *green good corporate governance* adalah sebesar 3,73% dan sisanya sebesar 96,27% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan pengolahan data secara deskriptif mengenai pengaruh *financial performance*, *ownership structure*, dan *credit risk* terhadap kebijakan dividen dengan *green good corporate governance* sebagai variable moderasi, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh *Financial Performance* terhadap Kebijakan Dividen (Y)

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *financial performance* terhadap kebijakan dividen diperoleh nilai probabilitas $> \text{Sig.}0,050$ atau $(0,5936 > 0,050)$. Dengan demikian maka H_1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *financial performance* terhadap kebijakan dividen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Afriani (2024), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *financial performance* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Meskipun *financial performance* atau kinerja keuangan biasanya dianggap sebagai faktor penting dalam keputusan kebijakan dividen, dalam beberapa kasus, hal ini tidak selalu berpengaruh langsung pada kebijakan dividen bank. Salah satu alasan utama adalah bahwa bank sering kali menerapkan kebijakan dividen yang stabil atau dividen yang dipertahankan untuk menjaga hubungan baik dengan pemegang saham. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada investor, meskipun kinerja keuangan bank mungkin berfluktuasi. Dengan kata lain, meskipun bank menghadapi penurunan laba atau kondisi keuangan yang lebih sulit, mereka mungkin tetap membayar dividen yang konsisten agar tidak merusak reputasi mereka di pasar. Dalam hal ini, kebijakan

dividen tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kinerja keuangan jangka pendek, tetapi lebih kepada strategi untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.

Selain itu, keputusan dividen bank sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih besar, seperti regulasi perbankan dan persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Bank harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tentang rasio kecukupan modal (CAR - *Capital Adequacy Ratio*), yang lebih penting daripada laba yang diperoleh dalam jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun bank memiliki kinerja keuangan yang baik, keputusan dividen sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan tingkat modal yang cukup untuk menghadapi risiko sistemik dan menjaga solvabilitas. Dalam hal ini, meskipun kinerja keuangan baik, keputusan untuk menahan atau mengurangi dividen mungkin lebih dipengaruhi oleh regulasi dan kebutuhan modal ketimbang laba yang diperoleh.

Terakhir, strategi jangka panjang dan prioritas investasi bank sering kali lebih mempengaruhi kebijakan dividen daripada kinerja keuangan sesaat. Banyak bank yang lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan ekspansi yang memerlukan reinvestasi laba kembali ke dalam bisnis, seperti untuk teknologi baru, pengembangan produk, atau ekspansi pasar. Dalam hal ini, meskipun bank memiliki laba yang tinggi, mereka mungkin memilih untuk menahan sebagian besar laba mereka untuk mendukung proyek-proyek strategis tersebut daripada membayar dividen yang lebih besar. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak meningkatkan dividen meskipun ada kinerja keuangan yang baik bisa berasal dari prioritas manajerial yang lebih besar terhadap investasi dan pengembangan bisnis daripada distribusi laba kepada pemegang saham.

2. Pengaruh *Ownership Structure* (X_2) terhadap Kebijakan Dividen (Y)

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *ownership structure* terhadap kebijakan dividen diperoleh nilai probabilitas $< \text{Sig.}0,050$ atau $(0,0405 < 0,050)$. Dengan demikian maka H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *ownership structure* terhadap kebijakan dividen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lajar & Marsudi (2021), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *ownership structure* terhadap kebijakan dividen.

Struktur kepemilikan pada bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen karena jenis pemegang saham dan hubungan antara pengendali dengan pemegang saham minoritas dapat mempengaruhi keputusan distribusi laba. Pada bank dengan kepemilikan terkonsentrasi, seperti bank yang dimiliki oleh sekelompok kecil investor besar atau perusahaan induk, pemegang saham mayoritas cenderung memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dividen. Mereka mungkin lebih mengutamakan stabilitas arus kas dan pendapatan jangka panjang melalui dividen yang konsisten. Hal ini karena pemegang saham mayoritas, yang juga memiliki kepentingan langsung dalam keuntungan bank, akan berusaha memaksimalkan pengembalian kepada diri mereka sendiri, baik dalam bentuk dividen atau keuntungan lain, seperti pengaruh terhadap keputusan strategis bank. Pada gilirannya, ini dapat mendorong bank untuk mempertahankan kebijakan dividen yang lebih konservatif dan stabil.

Di sisi lain, kepemilikan institusional pada bank, yang biasanya melibatkan investor besar seperti dana pensiun, hedge fund, atau perusahaan asuransi, juga mempengaruhi kebijakan dividen. Pemegang saham institusional cenderung lebih mengutamakan stabilitas dan konsistensi pembayaran dividen sebagai indikasi kesehatan finansial bank, serta preferensi mereka terhadap pengembalian yang dapat diprediksi. Bank dengan struktur kepemilikan institusional yang dominan mungkin merasa terdorong untuk menjaga kebijakan dividen yang dapat memberikan sinyal positif kepada

pasar dan pemegang saham mengenai kinerja dan solvabilitas bank. Selain itu, bank yang dimiliki oleh institusi besar lebih cenderung memperhatikan regulasi dan ekspektasi pasar terkait dividen sebagai instrumen kepercayaan terhadap stabilitas finansial mereka, terutama dalam sektor yang sangat diawasi seperti industri perbankan.

Terakhir, pada bank-bank yang memiliki kepemilikan pemerintah atau kepemilikan negara, keputusan kebijakan dividen sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-finansial yang lebih luas, seperti kebijakan ekonomi atau sosial pemerintah. Bank dengan kepemilikan negara sering kali memiliki kewajiban untuk mengutamakan kestabilan ekonomi dan pembiayaan sektor-sektor tertentu, daripada memaksimalkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas lebih cenderung untuk menahan laba guna mendukung pembiayaan yang lebih luas atau mempertahankan keseimbangan sistem keuangan, daripada membagikan dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, struktur kepemilikan yang melibatkan entitas publik atau negara dapat mempengaruhi kebijakan dividen dengan menekankan tujuan sosial atau ekonomi daripada fokus semata-mata pada pengembalian langsung kepada pemegang saham.

3. Pengaruh *Credit Risk* (X_3) terhadap Kebijakan Dividen (Y)

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *credit risk* terhadap kebijakan dividen diperoleh nilai probabilitas $> \text{Sig.}0,050$ atau $(0,6657 > 0,050)$. Dengan demikian maka H_3 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *credit risk* terhadap kebijakan dividen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meirawati (2024), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *credit risk* terhadap kebijakan dividen.

Meskipun *credit risk* dapat mempengaruhi stabilitas finansial bank, dalam beberapa kasus, risiko ini tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kebijakan dividen. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa bank biasanya memiliki kebijakan dividen yang terlepas dari fluktuasi jangka pendek dalam kualitas kredit atau risiko kredit. Bank besar dan mapan sering kali mengutamakan konsistensi pembayaran dividen sebagai cara untuk mempertahankan kepercayaan investor dan menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan risiko kredit, bank sering kali memilih untuk menjaga kebijakan dividen stabil agar tidak menurunkan ekspektasi pasar, terutama jika mereka memiliki cadangan modal yang cukup untuk menahan dampak dari kerugian kredit tanpa mengorbankan pembayaran dividen.

Selain itu, banyak bank memiliki strategi manajemen risiko kredit yang kuat yang dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari pinjaman bermasalah atau kredit macet. Bank yang memiliki portofolio kredit yang terdiversifikasi dan praktik manajemen risiko yang baik sering kali dapat mengatasi fluktuasi risiko kredit tanpa harus mengubah kebijakan dividen mereka. Dalam hal ini, meskipun ada peningkatan risiko kredit, bank mampu mengelola dan mengalokasikan cadangan yang cukup untuk menanggulangi kerugian, yang memungkinkan mereka untuk tetap mempertahankan pembayaran dividen yang konsisten. Oleh karena itu, meskipun ada fluktuasi dalam kualitas kredit, bank yang memiliki pengelolaan risiko yang baik sering kali tidak perlu menyesuaikan kebijakan dividen mereka secara drastis.

Selain itu, dalam beberapa situasi, faktor eksternal dan tujuan strategis dapat lebih memengaruhi kebijakan dividen dibandingkan dengan risiko kredit itu sendiri. Misalnya, bank yang berada dalam proses ekspansi atau restrukturisasi mungkin memilih untuk menahan laba dan menginvestasikannya kembali ke dalam bisnis, meskipun mereka menghadapi peningkatan risiko kredit. Dalam kasus seperti ini, bank mungkin

lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan penguatan posisi finansial secara keseluruhan daripada membayar dividen. Oleh karena itu, kebijakan dividen lebih dipengaruhi oleh strategi manajerial dan pertimbangan investasi jangka panjang daripada hanya mengutamakan pengelolaan risiko kredit jangka pendek. Dengan demikian, meskipun risiko kredit merupakan faktor yang perlu diperhatikan, hal itu tidak selalu mengubah keputusan terkait kebijakan dividen pada bank, terutama jika bank tersebut memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan tersebut.

4. Pengaruh *Financial Performance* (X_1), *Ownership Structure* (X_2), dan *Credit Risk* (X_3) terhadap Harga Saham (Z)

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *financial performance*, *ownership structure*, dan *credit risk* terhadap kebijakan dividen secara simultan diperoleh nilai probabilitas $< \text{Sig.}0,050$ atau $(0,000073 < 0,050)$. Dengan demikian maka H_4 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *financial performance*, *ownership structure*, dan *credit risk* terhadap kebijakan dividen secara simultan.

Financial performance, *ownership structure*, dan *credit risk* semuanya berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada bank, karena ketiganya mencerminkan kondisi keuangan dan strategi operasional bank yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai distribusi laba kepada pemegang saham. *Financial performance*, atau kinerja keuangan bank, adalah faktor utama dalam menentukan seberapa banyak laba yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Bank dengan kinerja keuangan yang baik, misalnya, laba yang tinggi dan arus kas yang stabil, lebih mungkin untuk membayar dividen yang lebih besar. Sebaliknya, jika kinerja keuangan buruk—misalnya karena penurunan pendapatan atau kerugian—bank mungkin akan memilih untuk menahan laba guna memperkuat posisi keuangan atau mengatasi tantangan operasional. Oleh karena itu, *financial performance* berpengaruh langsung dalam memutuskan apakah bank akan membayar dividen dan seberapa besar jumlahnya.

Ownership structure atau struktur kepemilikan juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dividen pada bank. Pada bank yang dimiliki oleh sekelompok pemegang saham mayoritas, seperti perusahaan keluarga atau investor institusional besar, kebijakan dividen cenderung dipengaruhi oleh preferensi pemegang saham utama. Pemegang saham mayoritas sering kali ingin memastikan distribusi laba yang optimal, yang bisa berarti membayar dividen yang lebih tinggi atau menahan laba untuk investasi strategis yang mendukung kontrol mereka terhadap bank. Di sisi lain, pada bank yang memiliki kepemilikan terdiversifikasi, kebijakan dividen lebih dipengaruhi oleh tujuan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas bagi investor, sehingga dividen cenderung lebih teratur dan kurang fluktuatif meskipun terjadi perubahan dalam kinerja keuangan.

Credit risk atau risiko kredit juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen, karena tingkat risiko kredit yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Jika bank memiliki portofolio kredit yang bermasalah atau menghadapi risiko kredit yang tinggi, mereka mungkin harus mencadangkan lebih banyak dana untuk penyisihan kerugian kredit atau memperkuat posisi modal mereka untuk menghadapi kemungkinan kerugian di masa depan. Ini dapat mengurangi dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Bank dengan eksposur risiko kredit yang tinggi biasanya lebih berhati-hati dalam pembayaran dividen, karena mereka perlu menjaga kesehatan finansial jangka panjang dan memastikan mereka memiliki cukup cadangan untuk mengatasi potensi kerugian. Oleh karena itu, bank dengan risiko kredit yang tinggi mungkin memilih untuk menahan dividen atau

membayar dividen yang lebih kecil agar dapat mengelola risiko finansial mereka secara lebih hati-hati.

5. Pengaruh *Financial Performance* (X₁) terhadap Kebijakan Dividen (Y) dengan *Green Good Corporate Governance* (Z) sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *financial performance* terhadap kebijakan dividen yang dimoderasi oleh *green good corporate governance* diperoleh nilai probabilitas $> \text{Sig.}0,050$ atau $(0,2015 > 0,050)$. Dengan demikian maka H₅ ditolak, hal ini menunjukkan bahwa *green good corporate governance* tidak mampu memoderasi antara *financial performance* terhadap kebijakan dividen.

Meskipun terdapat *good corporate governance* yang kuat, termasuk prinsip-prinsip *green good corporate governance*, dapat berkontribusi pada pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan berkelanjutan, ada alasan mengapa *green good corporate governance* tidak selalu dapat memoderasi hubungan antara *financial performance* dan kebijakan dividen pada perbankan. Kebijakan dividen sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan jangka pendek, yang sering kali lebih bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, peraturan perbankan, dan fluktuasi pasar. Meskipun *green good corporate governance* yang baik memastikan bahwa keputusan diambil dengan transparansi dan akuntabilitas, bank tetap harus mengutamakan stabilitas finansial dan kecukupan modal mereka terlebih dahulu. Jika kinerja keuangan bank buruk, meskipun ada pengawasan dan praktik *green good corporate governance* yang baik, bank mungkin masih akan memilih untuk menahan laba untuk mengatasi masalah finansial, daripada membayar dividen.

Selain itu *green good corporate governance* yang fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, meskipun penting untuk jangka panjang, tidak selalu sejalan dengan keputusan dividen yang dipengaruhi oleh keuangan jangka pendek. Bank yang beroperasi dengan *green good corporate governance* mungkin memiliki komitmen yang lebih besar terhadap investasi jangka panjang dan inovasi berkelanjutan, seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan atau inisiatif sosial, yang bisa mengurangi jumlah laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dalam hal ini, meskipun kebijakan *green good corporate governance* yang baik memastikan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan, keputusan mengenai dividen sering kali lebih dipengaruhi oleh prioritas investasi dan regulasi sektor perbankan daripada prinsip-prinsip *green good corporate governance* itu sendiri.

Struktur permodalan dan regulasi yang ketat dalam industri perbankan sering kali lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan dividen daripada faktor tata kelola perusahaan, termasuk prinsip-prinsip *green good corporate governance*. Bank harus mematuhi persyaratan regulasi terkait rasio kecukupan modal dan solvabilitas yang ditetapkan oleh regulator perbankan, yang kadang-kadang mengharuskan bank untuk menahan laba atau mengurangi dividen demi memperkuat posisi modal mereka. Bahkan dengan adanya *green good corporate governance* yang baik, bank yang memiliki risiko kredit tinggi atau terpengaruh oleh tekanan regulasi untuk mempertahankan kecukupan modal mungkin tetap memilih untuk menahan dividen. Oleh karena itu, meskipun *green good corporate governance* berperan dalam memastikan keputusan yang bertanggung jawab dan transparan, ia tidak selalu dapat memoderasi dampak kinerja keuangan terhadap kebijakan dividen karena faktor-faktor regulasi dan finansial yang lebih mendesak.

6. Pengaruh *Ownership Structure* (X_2) terhadap Kebijakan Dividen (Y) dengan *Green Good Corporate Governance* (Z) sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *ownership structure* terhadap kebijakan dividen yang dimoderasi oleh *green good corporate governance* diperoleh nilai probabilitas $< \text{Sig.}0,050$ atau $(0,0347 < 0,050)$. Dengan demikian maka H_6 diterima, hal ini menunjukkan bahwa *green good corporate governance* mampu memoderasi antara *ownership structure* terhadap kebijakan dividen.

Green good corporate governance dapat memoderasi hubungan antara *ownership structure* dan kebijakan dividen pada bank karena prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi yang diadopsi dalam *green good corporate governance* mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan adil. Pada bank dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas sering memiliki kontrol besar terhadap kebijakan dividen, dan keputusan mereka sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek atau keuntungan pribadi. Namun, dengan penerapan *green good corporate governance*, pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka, transparan, dan berfokus pada kepentingan jangka panjang seluruh pemegang saham, bukan hanya pemegang saham mayoritas. *Green good corporate governance* mendorong pemegang saham mayoritas untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan dividen dengan lebih bijak dan berkelanjutan.

Dalam struktur kepemilikan terdiversifikasi, di mana banyak pemegang saham dengan tujuan yang berbeda, prinsip-prinsip *green good corporate governance* dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dividen tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi segelintir investor besar. *Green good corporate governance* mendukung keberagaman suara dalam pengambilan keputusan dan mendorong bank untuk lebih memperhatikan kesejahteraan seluruh pemegang saham, bukan hanya untuk memenuhi keinginan beberapa pihak. Kebijakan dividen yang diambil di bawah prinsip *green good corporate governance* lebih cenderung mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan pengelolaan risiko, yang dapat menghasilkan keputusan dividen yang lebih seimbang, meskipun ada kepemilikan yang terdiversifikasi. Dengan demikian, *green good corporate governance* dapat membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai kelompok pemegang saham dalam menentukan kebijakan dividen.

Green good corporate governance berperan dalam memitigasi potensi konflik yang timbul dalam struktur kepemilikan yang lebih kompleks, seperti pada bank yang dimiliki oleh pemegang saham institusional atau pihak ketiga dengan tujuan jangka panjang yang berbeda. *Green good corporate governance* mengharuskan bank untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan dividen yang memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini memoderasi keputusan dividen yang mungkin hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek dengan memperkenalkan elemen keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam keputusan dividen. Meskipun pemegang saham institusional atau besar mungkin menginginkan dividen yang lebih tinggi untuk memberikan pengembalian yang lebih besar, *green good corporate governance* mendorong mereka untuk mempertimbangkan apakah pembagian dividen yang lebih besar dapat menghambat kemampuan bank untuk berinvestasi dalam proyek berkelanjutan atau memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, *green good corporate governance* mampu memastikan bahwa kebijakan dividen tidak hanya didorong oleh keuntungan finansial semata, tetapi juga oleh tujuan jangka panjang dan keberlanjutan.

7. Pengaruh *Credit Risk* (X_3) terhadap Kebijakan Dividen (Y) dengan *Green Good Corporate Governance* (Z) sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap *credit risk* terhadap kebijakan dividen yang dimoderasi oleh *green good corporate governance* diperoleh nilai probabilitas $> \text{Sig.}0,050$ atau $(0,4234 > 0,050)$. Dengan demikian maka H_7 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa *green good corporate governance* tidak mampu memoderasi antara *credit risk* terhadap kebijakan dividen.

Green good corporate governance dapat memoderasi hubungan antara *credit risk* dan kebijakan dividen pada bank karena prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam *green good corporate governance* mendorong pengelolaan risiko yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Ketika bank menghadapi risiko kredit yang tinggi, biasanya mereka perlu menyisihkan lebih banyak dana untuk cadangan kerugian kredit atau meningkatkan kecukupan modal untuk menghadapi potensi kerugian. Namun, dengan adanya *green good corporate governance*, bank didorong untuk mengelola risiko ini dengan lebih efektif dan transparan, serta memastikan bahwa keputusan dividen didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, *green good corporate governance* dapat mendorong manajemen untuk menahan dividen jika risiko kredit meningkat, sehingga menjaga stabilitas bank dan menghindari keputusan dividen yang dapat memperburuk kondisi keuangan di masa depan.

Prinsip *good corporate governance* yang tercermin dalam *green good corporate governance* mendorong bank untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit secara menyeluruh. Dalam konteks ini, *green good corporate governance* mengharuskan bank untuk memiliki proses pengawasan yang lebih ketat dan laporan yang lebih transparan mengenai risiko kredit yang dihadapi. Jika risiko kredit meningkat, *green good corporate governance* dapat mendorong bank untuk mengurangi pembayaran dividen dan mengalokasikan laba untuk memperkuat cadangan kerugian kredit atau meningkatkan modal. Dengan cara ini, *green good corporate governance* membantu memastikan bahwa bank tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek bagi pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kesehatan jangka panjang bank dan dampak dari risiko kredit terhadap kestabilan finansial mereka.

Green good corporate governance dapat mengubah cara bank berinteraksi dengan pemegang saham dalam hal pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen saat menghadapi peningkatan risiko kredit. Di bawah prinsip *green good corporate governance*, bank lebih cenderung untuk melibatkan pemegang saham dalam keputusan penting yang berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan finansial bank, termasuk pengelolaan risiko kredit dan keputusan dividen. Dalam situasi di mana risiko kredit tinggi, *green good corporate governance* dapat memoderasi tekanan dari pemegang saham untuk membayar dividen yang lebih tinggi, dengan menekankan pentingnya berinvestasi kembali dalam modal dan cadangan untuk menjaga keberlanjutan bank. Hal ini mendorong keputusan dividen yang lebih prudent dan berbasis pada pertimbangan jangka panjang, yang pada akhirnya mengurangi dampak negatif dari risiko kredit terhadap kebijakan dividen bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan tesis ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. *financial performance* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
2. *ownership structure* berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
3. *credit risk* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
4. *financial performance*, *ownership structure* dan *credit risk* secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
5. *Green good corporate governance* tidak mampu memoderasi *financial performance* terhadap kebijakan dividen.
6. *Green good corporate governance* mampu memoderasi *ownership structure* terhadap kebijakan dividen.
7. *Green good corporate governance* tidak mampu memoderasi *credit risk* terhadap kebijakan dividen.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, harus memastikan bahwa kebijakan dividen tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. *Green good corporate governance* mendorong bank untuk menilai keberlanjutan dalam setiap keputusan bisnis, termasuk keputusan dividen. Selain itu struktur kepemilikan perusahaan harus diintegrasikan dalam kebijakan dividen dengan cara yang adil dan transparan, terutama jika perusahaan memiliki pemegang saham mayoritas yang dapat mempengaruhi kebijakan. Terkait dengan *credit risk*, penerapan *green good corporate governance* dapat membantu perusahaan, terutama bank, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan pembagian dividen saat menghadapi potensi peningkatan risiko kredit.

2. Bagi Investor

Bagi para investor dan calon investor disarankan agar benar-benar memperhatikan faktor-faktor fundamental atau rasio keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi diperusahaan tersebut . Khususnya investasi dalam bentuk saham hendaknya para investor melakukan pengamatan mengenai kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Sampel untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya perusahaan pada sektor perbankan saja, tetapi juga perusahaan non-perbankan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat digeneralisasi keseluruhan perusahaan di Indonesia.
- b. Jangka waktu penelitian dapat diperpanjang dan dengan jumlah sampel perusahaan yang lebih besar. Perpanjangan periode penelitian dan penambahan jumlah sampel agar memberikan hasil yang lebih baik.
- c. Variabel independen dalam penelitian sebaiknya lebih banyak lagi agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal..

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Anggoro, M. Mustafid, and P. Kartikasari, "PENDEKATAN MODEL KMV MERTON UNTUK PENGUKURAN NILAI RISIKO KREDIT OBLIGASI EXPECTED DEFAULT FREQUENCY (EDF) DILENGKAPI GUI R," Jurnal Gaussian, vol. 12, no. 1, pp. 92-103, May. 2023. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.1.92-103>

- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Ahmad N. Obaidat, (2018). "Ownership Structure and Dividends Policy: Emerging Market Evidence," *International Business Research*, Canadian Center of Science and Education, vol. 11(6), pages 65-72, June.
- Anam, H., & Hendra, H. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 213–228. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i2.126>
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Bansal, Pratima., & Roth, K. (2000). Why Companies Go Green : Responsiveness. *Academy of Management*, 43(4), 717–736. <http://www.jstor.org/stable/1556363>.
- Blum, J. (1999). Do capital adequacy requirements reduce risks in banking? *Journal of Banking and Finance*, 23(5), 755–771. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(98\)00113-7](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00113-7)
- Brigham, E. F. & Ehrhardt, M. C. (2019). *Financial Management Theory & Practice* 16th edition. Boston: Cengage.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan 1 (Edisi 14)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Cahyadi, R. T., Purwanti, L., & Mardiaty, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Risiko Idiosinkratis terhadap Dividend Payout Ratio. *Jurnal Economia*, 14(1), 99. ISSN: 2460-1152
- Cahyadi, R. T., Purwanti, L., & Mardianty, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris, Komisaris Independen Dan Risiko Idiosinkratis Terhadap Dividend Payout Ratio. *Jurnal Economia*, 14(1), 99–112.
- David Wilbert, & Augustpaosa Nariman. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(2), 908–917. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i2.19687>
- Demsetz, H., & Lehn, K. (2009). The Structure Of Corporate Ownership: Causes And Consequences. *Readings In Applied Microeconomics: The Power Of The Market*, 93(6), 383–401. <https://doi.org/10.4324/9780203878460>
- Dewi, M. K., & Afriani, Y. (2024). Pengaruh Return On Asset Dan Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018 - 2022. *Jma*, 2(5), 3031–5220.
- Effendi (2019). *The Power of Good Corporate Governance Teori and Implementasi* Jakaarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2020). *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Soal Jawab (Edisi 7)*. CV Alfabeta, Bandung.
- Firdaus, S. N., Mujino, & Rinofah, R. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Arus Kas Bebas, Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 77–85.
- Ghozali, I. (2021). *Analisis Multivariate Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews 10 Ed. 2 (Edisi 2)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H. S. Lestari, H. R. T. E. F. A. L. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan

- Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 345. <https://doi.org/10.24912/je.v26i3.795>
- Hanafy, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi 5)*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Handini, S., & Astawinetu, E. D. (2020). *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia (Edisi 1)*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Harjito, D. A., & Martono. (2021). *Manajemen Keuangan (Edisi 3)*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hery, A. (2016). *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan (Edisi 1)*. Grasindo, Jakarta.
- Horne, V., & Wachowicz. (2015). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta; Salemba Empat.
- Husin, J., & Sri, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Publik Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.32524/jia.v2i2.981>
- Husnan, S. (2019). *Dasar-Dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas (Edisi 5)*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2018). *Buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi 7)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2020). *Teori Portofolio dan Pasar Modal*. In Yogyakarta, UPP AMP YKPM (Edisi 4). Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In R. S. Kroszner & L. Putterman (Ed.), *The economic nature of the firm* (hal. 283–303). ISBN: 9780511817410
- Jogiyanto, H. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. In Yogyakarta: BPFE (Edisi 11). BPFE, Yogyakarta.
- Karyoto. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kasmir, (2018). *Manajemen sumber daya manusia (teori dan praktik)*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi 11)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kristiawan, M., dkk. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lajar, S. N. I., & Marsudi, A. S. (2022). Dampak Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Kebijakan Utang Terhadap Kebijakan Dividen Di Industri Pertambangan Indonesia. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 18(2), 148–162. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i2.3133>
- Maswadeh, Sanaa. (2018). The Effect of the Ownership Structure on Earnings Management Practices. *Investment Management and Financial Innovations*, 46–60.
- Meirawati, E., Hamzah, R. S., Gozali, E. O. D., Azzahra, A., & Chulim, F. R. (2024). Analisis Kebijakan Dividen melalui Indikator Sektor Perbankan di 5 Negara ASEAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(3), 249–263. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i3.3115>
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rate. *Journal of Finance* Vol. 29, No. 2, Hal: 449–470
- Muchtar, B., Rose, R., & Kurnia, S. M. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi 1)*. Kencana, Jakarta.
- Munawir. S. 2002. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Revisi. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Murhadi, W. R. (2019). *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham (Edisi 1)*.

- Salemba Empat, Jakarta.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. (P. Christian, Penyunt.) Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- Natsir, A. W., Yusuf, N., Rais, M., & ... (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Saham Pada Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Dikuasai Oleh Kepemilikan Asing Yang Terdaftar Di BEI. *Economics and Digital ...*, 4(2), 219–229. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/747%0Ahttps://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/747/491>
- Nuryani, W. (2024). Pengaruh Return On Asset, Non-Performing Loans, Dan Inflasi Terhadap Dividen Payout Ratio Bank BTPN. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 1–6.
- Riduwan. (2020). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Edisi 7). CV Alfabeta, Bandung.
- Riyanto, B. (2015) *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Rukajat, A. (2018). *Buku Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Edisi 1). CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Salempang, S. V., & Saerang, I. S. (2022). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Dividen Pada Perusahaan Perbankan Kategori Buku 4. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(3), 893. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.43209>
- Sartono, A. (2021). *Manajemen Keuangan Teori dan Apikasi* (Edisi 4). BPFE, Yogyakarta.
- Sawir, A. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawanta, Y. (2019). Does Good Corporate Governance Able To Moderate The Relationship Of Financial Performance Towards Firm Value?. *Jurnal Akuntansi*, p-ISSN: 2085-9643, e-ISSN: 2502-6380, Vol 11 (1), October 2019, 9-20, DOI: 10.26740/jaj.v11n1.p9-20, <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
- Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-374.
- Sudradjat (2020). *CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR*. P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 1). CV Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian* (Edisi 1). Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suleman, D., & Susilowati, I. H. (2019). *Manajemen Keuangan* (Edisi 1). Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surbakti, E. A. B., & Ramadhan, A. F. (2021). Pengaruh Ownership Structure dan Board Governance Terhadap Dividend Payout Ratio. *Indicators : Journal of Economic and Business*, 3(1), 396–411. <https://doi.org/10.47729/indicators.v3i1.73>
- Sutrisno. (2020). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikas* (Ed. Revisi). Ekonisia, Yogyakarta.
- Syaifuddin, D. T., Sarita, B., & Mahrani, S. W. (2021). *Manajemen Keuangan Internasional (Suatu Pengantar)* (Edisi 1). Kurnia Global Diagnostika, Yogyakarta.
- Tandelilin, E. (2019). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio & Investasi* (G. Sudiby (ed.); Edisi 1). PT Kanisius, Yogyakarta.
- Wilbert, D. dan A. Nariman. 2022. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. 4(2): 908-917.